

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

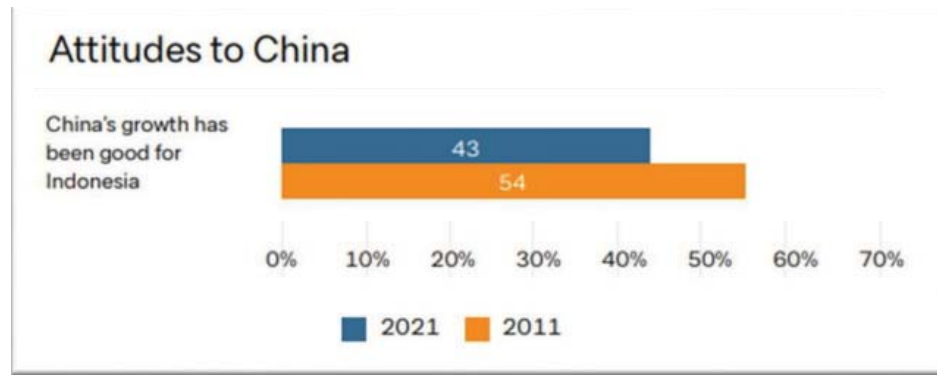
Rivalitas antara Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok di arena perpolitikan global telah menjadi topik yang hangat dibahas. Kehadiran Tiongkok sebagai *the new emerging power* dari kawasan Asia dengan menggantikan Jepang sebagai negara dengan kekuatan ekonomi kedua terbesar di dunia setelah AS telah menunjukkan kemajuan pesat dan potensi Tiongkok dalam menggeser hegemoni AS di masa mendatang. Rivalitas kedua negara adidaya tersebut telah berdampak bagi berlangsungnya perekonomian dan perpolitikan global, terutama bagi negara-negara yang berada dekat dengan kedua aktor adidaya tersebut. AS, di bawah perjanjian barunya dengan Meksiko dan Kanada – USMCA, berupaya mengisolasi kehadiran Tiongkok di negara-negara tersebut. Strategi ini juga dilakukan oleh AS kepada negara-negara di Asia, seperti Jepang, Korea Selatan dan negara-negara sekutu lainnya. Selain negara-negara tersebut, memanasnya pergolakan geopolitik ini juga dirasakan oleh negara-negara di kawasan Asia Tenggara dalam konflik Laut Cina Selatan (LCS). Baik AS dan Tiongkok telah meningkatkan interaksi mereka dengan negara-negara ASEAN dengan tujuan memengaruhi keputusan mereka dalam mengambil posisi. Tiongkok menggunakan proyek Belt Road Initiative (BRI) dalam memenangkan dukungan negara-negara tersebut (Shafeeq, 2020). Rivalitas dalam perebutan posisi hegemoni ini didorong oleh motif untuk memperoleh keuntungan dengan membujuk atau memaksa negara lain untuk membuka perekonomian mereka, sehingga akses terhadap makanan, bahan mentah, dan barang impor lainnya menjadi lebih murah serta mampu mencukupi kebutuhan dan membantu meningkatkan standar hidup konsumen domestiknya.

Cakupan global dari pergolakan geopolitik ini kemudian menyentuh negara-negara di kawasan Asia-Pasifik. Kemunculan Tiongkok sebagai kekuatan ekonomi baru di kawasan Asia telah menggeser fokus AS dalam melaksanakan politik luar negerinya ke kawasan Asia-Pasifik demi membendung perluasan dan penguatan pengaruh Tiongkok. Dalam esai untuk kebijakan luar negeri pada tahun 2011,

Hillary Clinton – selaku Menteri Luar Negeri AS periode 2009 – 2013, menguraikan seruan terkait ‘pivot’ AS dengan upaya peningkatan investasi, diplomatik, ekonomi, strategis, dan sebagainya ke kawasan Asia-Pasifik. Salah satu negara yang kemudian menjadi tujuan dari upaya pengerahan strategi-strategi tersebut adalah Indonesia. Indonesia merupakan salah satu negara kawasan Asia Tenggara dengan total populasi terbesar keempat di dunia yang potensial bagi rivalitas AS dan Tiongkok. Selain itu, Indonesia dipandang sebagai *leading Southeast Asia power* dan memegang posisi penyeimbang vital dalam rivalitas geopolitik saat ini dengan prinsip politik luar negeri ‘Bebas-Aktif’-nya, sehingga Bland (2021) memandang bahwasanya dukungan dari Indonesia diperlukan baik oleh AS dan Tiongkok. ‘Bebas’ artinya tidak memihak pada kekuatan dunia, sementara ‘Aktif’ berarti Indonesia tidak mempertahankan sikap pasif atau reaktif terhadap isu-isu internasional tetapi mencari partisipasi aktif dalam penyelesaiannya. Dengan demikian, kebijakan luar negeri Indonesia tidak memosisikan diri di posisi netral, melainkan tidak menyelaraskan diri dengan kekuatan dunia dan tidak mengikatkan diri pada pakta militer mana pun untuk melayani kepentingan nasional serta memungkinkan Indonesia untuk bekerja sama dalam menghapuskan imperialisme dan kolonialisme dalam berbagai bentuknya demi mencapai perdamaian dunia dan keadilan sosial (Hatta, 1951).

Prinsip Bebas-Aktif tersebut secara konsisten dipegang oleh Indonesia di tengah rivalitas AS dan Tiongkok yang ditunjukkan dengan ketidakberpihakan Indonesia kepada salah satu kekuatan. Indonesia juga berhasil mempertahankan hubungan bilateral baik dengan AS maupun Tiongkok di tengah rivalitas keduanya yang semakin memanas (Rakhmat & Pashya, 2021). Namun opini publik masyarakat Indonesia terhadap kehadiran dua kekuatan dunia tersebut menjadi suatu hal yang tidak dapat dihindari. Hal ini kemudian menunjukkan bahwa rivalitas AS dan Tiongkok tidak hanya berkutat pada urusan ekonomi dan politik saja, melainkan urusan-urusan yang melibatkan pengerahan *soft power* dan upaya pendekatan *people-to-people* dengan penggunaan diplomasi publik. Hasil survei Lowy Institute Indonesia Poll 2021 oleh Bland, Laksamana & Kassam menunjukkan bahwa respons masyarakat Indonesia terhadap AS dan Tiongkok mengalami penurunan. Data menunjukkan bahwa terjadi penurunan kepercayaan masyarakat Indonesia

terhadap kedua negara adidaya tersebut dalam kurun waktu sepuluh tahun – dimulai dari tahun 2011 hingga tahun 2021 – dengan hasil yang menyatakan bahwa ketidakpercayaan masyarakat Indonesia terhadap Tiongkok lebih besar dibandingkan terhadap AS. Hal tersebut ditunjukkan dalam grafik yang membandingkan respons masyarakat Indonesia terhadap pertumbuhan Tiongkok bagi Indonesia pada tahun 2011 di angka 54% menjadi 43% di tahun 2021.



Hasil Polling Lowy Institute Indonesia terkait Perilaku Masyarakat Indonesia terhadap Tiongkok periode 2011 – 2021

Sumber: Charting Their Own Course: How Indonesians See the World

Hasil Polling ini tidak memiliki korelasi dengan *cultural proximity* antara Indonesia dengan Tiongkok, melainkan menjadi gambaran umum terkait pandangan masyarakat Indonesia terhadap Tiongkok dari kurun waktu tahun 2011 hingga 2021.

Padahal, apabila kembali merujuk pada faktor kesamaan dan kedekatan budaya atau *cultural proximity* dalam memengaruhi opini publik masyarakat Indonesia terhadap dua kekuatan adidaya tersebut, Tiongkok seharusnya menempati posisi diuntungkan daripada AS. Argumen Geva dan Hanson (1999) menjelaskan bahwasanya kehadiran *cultural proximity* mampu memengaruhi perspektif dari masyarakat asing. Fenomena ini kemudian menjadi menarik untuk dibahas karena kehadiran *cultural proximity* gagal dalam menjelaskan opini publik masyarakat Indonesia justru lebih negatif terhadap Tiongkok dibandingkan AS.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis mengajukan rumusan masalah sebagai berikut: Mengapa *cultural proximity* gagal dalam menjelaskan opini publik masyarakat Indonesia yang lebih negatif terhadap Tiongkok dibandingkan terhadap AS?

1.3. Tinjauan Literatur

Untuk mengetahui alasan di balik gagalnya *cultural proximity* dalam menjelaskan Opini Publik masyarakat Indonesia yang lebih negatif terhadap Tiongkok dibandingkan terhadap AS, penulis berangkat dari tulisan-tulisan terdahulu yang membahas mengenai dampak kehadiran *cultural proximity*, upaya diplomasi publik suatu negara dan terbentuknya opini publik masyarakat sebagai hasil dari upaya diplomasi publik.

Yoo, Jo dan Jung (2014) menyajikan data terkait pandangan masyarakat Tiongkok dan Jepang terhadap fenomena mengglobalnya produk kebudayaan Korea Selatan atau Hallyu. Yoo, Jo dan Jung berfokus pada *cultural proximity* dan *ethnocentrism* sebagai variabel utama dalam tulisan mereka. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa meskipun Tiongkok dan Korea berbagi nilai dan norma tradisional Konfusianisme serta kedekatan geografis, sampel Tiongkok tidak mencerminkan tingkat kedekatan budaya yang signifikan dengan Korea. Hasil menunjukkan bahwa kedua negara menjadi lebih berbeda dalam hal nilai budaya dan gaya hidup, yang mungkin merupakan indikasi perubahan sikap setelah transformasi politik dan ekonomi. Misalnya, orang Cina masih sangat menghargai keluarga sedangkan orang Korea Selatan menjadi lebih individualistik dan kebarat-baratan. Di sisi lain, sampel Jepang justru menunjukkan tingkat keselarasan budaya yang lebih tinggi dengan Korea Selatan dikarenakan kesamaan dalam memegang sistem ekonomi kapitalis dan Konfusianisme.

Tulisan Trajkov dan Trajkov (2015) membahas terkait pengaruh diplomasi publik terhadap visibilitas negara dalam hubungan internasional. Trajkov dan Trajkov membandingkan model diplomasi publik yang dilakukan Hongaria, Polandia, Republik Ceko dan Makedonia dengan model diplomasi publik AS – secara umum

dan pasca peristiwa 9/11 – sebagai perbandingan untuk mengetahui efektivitas dari masing-masing upaya diplomasi publik negara-negara yang secara formal tidak demokratis menurut beberapa norma internasional dalam hal diplomasi tersebut. Hasil dari perbandingan yang diperoleh, ditemukan bahwa Hongaria, Polandia dan Ceko menggunakan strategi diplomasi publiknya untuk membentuk opini mengenai masyarakat modern mereka di mata negara-negara Barat yang berpengaruh. Hal ini terjadi, umumnya karena persepsi tentang masyarakat ketiga negara ini sangat negatif. Pemerintah membujuk masyarakat mereka sendiri tentang keinginan proses akses Uni Eropa. Namun, Republik Ceko terlihat lebih menguntungkan daripada yang lain karena pertumbuhan ekonomi yang stabil dan pembukaan pasar yang cepat. Di sisi lain, terdapat model Makedonia yang memiliki segmen dan merupakan bagian dari instrumen diplomasi publik, seperti promosi budaya, promosi peluang investasi dan promosi pariwisata. Dengan bergabung dalam segmen-segmen tersebut, Makedonia dapat berhasil membentuk strategi diplomasi publik yang akan efektif secara internasional. Makedonia juga mendelegasikan banyak kegiatan pemerintah kepada masyarakat sipil dan lembaga swadaya masyarakat (LSM). Jika kemudian dibandingkan dengan strategi diplomasi publik AS, yang terkenal dengan pendekatan yang komprehensif dengan keterlibatan berbagai macam lembaga – termasuk pemerintah – dalam masalah diplomasi publik, maka Makedonia menggunakan strategi diplomasi publik yang hampir sama dengan AS. Diplomasi publik AS memberikan pelengkap kebijakan luar negeri terhadap diplomasi tradisional antar-pemerintah yang didominasi oleh interaksi resmi yang dilakukan antara diplomat profesional. Kegiatan komunikasi yang dimaksudkan terutama untuk menginformasikan dan mempengaruhi dan berinteraksi langsung dengan warga, pemimpin masyarakat dan sipil, jurnalis dan pemimpin opini lain dari negara lain. USAID adalah contoh yang bagus dari lembaga pemerintah AS yang melakukan pekerjaan besar dalam membentuk opini asing yang mendukung AS.

Berikutnya adalah tulisan Albishri, Lan dan Kioussis (2021) yang berupaya melihat peristiwa kontestasi *agenda-building* melalui *mediated Public Diplomacy* dalam Krisis Diplomatik Teluk. Hasil temuan dari tulisan ini menunjukkan bahwa Al-Jazeera, yang merupakan media yang disponsori oleh Qatar, lebih unggul dalam

‘peperangan diplomasi publik’ dengan Al-Arabiya, yang merupakan media yang disponsori oleh Saudi. Hal ini dilihat dari efektivitas Al-Jazeera dalam membangun agendanya di lingkup regional dan global. Krisis diplomatik Teluk yang menyebabkan pemutusan hubungan antara Arab Saudi, Uni Emirat Arab (UEA), Bahrain dan Mesir dengan Qatar yang diduga mendanai teroris dan upaya destabilisasi kawasan melalui *outlet* medianya (Milton-Edwards, 2017). Peristiwa ini kemudian berusaha diulas oleh dua media sponsor masing-masing negara tersebut. Albishri, Lan dan Kioussis (2021) menemukan bahwa sikap politik dari tuan rumah sumber berita dapat menjelaskan kekuatan dari *agenda-building* yang dilakukan. Sumber berita dari negara-negara pendukung Qatar selama berlangsungnya krisis memiliki konvergensi yang tinggi dengan Al-Jazeera. Meskipun Al-Jazeera dan Al-Arabiya memiliki korelasi *issue-framing* yang sama dengan Daily Sabah dari Turki, korelasi Al-Jazeera tetap lebih signifikan. Hal ini juga dilatarbelakangi oleh posisi Turki yang mendukung Qatar selama krisis berlangsung. Secara keseluruhan, ini menunjukkan bahwa kedekatan politik dan ekonomi yang relatif antara Qatar dengan Turki selama krisis telah berkontribusi pada transfer agenda yang lebih kuat dari media yang disponsori negara Qatar ke media arus utama di negara-negara sekutunya. Kesimpulan tersebut konsisten dengan penelitian Sheaffer dan Gabay (2009) yang menyelidiki peran homofili sistem sosial dalam mempengaruhi kekuatan agenda internasional dan efek *frame-building* di antara media asing.

Dari tinjauan Pustaka di atas, dapat diketahui bahwa *cultural proximity* antara dua negara atau lebih telah memberi dampak yang positif dalam membentuk opini publik masyarakat asing terhadap suatu negara. Namun, dalam kasus K-Wave di Tiongkok, temua Yoo, Jo dan Jung (2014) justru menemukan faktor lain yang menyebabkan masyarakat Tiongkok beranggapan bahwa kebudayaan Korea Selatan tidak lagi relevan dengan nilai-nilai budaya Konfusius yang masih dipegang teguh oleh masyarakat Tiongkok. Argumen Yoo, Jo dan Jung (2014) dalam menjelaskan fenomena tersebut adalah adanya *ethnocentrism* di kalangan masyarakat Tiongkok dan perbedaan sistem ekonomi dan politik antara kedua negara. Pada tulisan Trajkov dan Trajkov (2015) lebih menjelaskan terkait peranan diplomasi publik dalam meningkatkan visibilitas negara dalam praktik hubungan

internasional. Strategi diplomasi publik yang digunakan oleh negara sangat memengaruhi bagaimana opini publik masyarakat domestik dan internasional terhadap negara tersebut. Dalam tulisan ini, AS menjadi contoh ideal bagi strategi diplomasi publik yang berhasil memberikan keuntungan bagi negaranya dengan terdapatnya keterlibatan berbagai lembaga, upaya komunikasi kepada pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat negara lain. Terakhir adalah tulisan Albishri, Lan dan Kiouis (2021) yang menjelaskan bahwasanya terdapat faktor politik yang kemudian mendorong kesuksesan upaya diplomasi publik suatu negara di negara lain. Dalam konteks ini, Qatar dengan Al-Jazeera berhasil membentuk *agenda-building* di lingkup internasional, utamanya negara-negara Barat, dengan konsistensi mereka dalam penyajian konten berita dan penggunaan bahasa Inggris. Selain itu, meskipun Al-Jazeera dan Al-Arabiya memiliki korelasi *issue-framing* yang sama dengan Daily Sabah dari Turki, korelasi Al-Jazeera tetap lebih signifikan karena adanya latar belakang posisi Turki yang mendukung Qatar selama krisis berlangsung. Dengan kata lain, upaya diplomasi Qatar lebih berhasil dikarenakan adanya kedekatan politik atau *political proximity* dan ekonomi atau *economic proximity* yang relatif dengan Turki selama krisis dan kedekatan-kedekatan relatif tersebut telah berkontribusi pada transfer agenda yang lebih kuat dari media yang disponsori negara Qatar ke media arus utama di negara-negara sekutunya. Dalam tulisan ini, penulis berupaya menunjukkan penyebab dari kegagalan dari *cultural proximity* dalam menjelaskan opini publik masyarakat Indonesia yang lebih negatif terhadap Tiongkok dibandingkan dengan AS melalui nilai-nilai yang ada di masyarakat Indonesia, sehingga penelitian ini kemudian berbeda dengan tulisan-tulisan yang sudah ada sebelumnya.

1.4. Kerangka Pemikiran

Jawaban atas rumusan masalah yang diajukan setidaknya dapat dijelaskan melalui kerangka pemikiran sebagai berikut:

1.4.1. Diplomasi Publik sebagai Upaya Pembentukan Opini Publik

Dalam tulisannya, Nye (2008) menyebutkan bahwasanya diplomasi merupakan upaya mempromosikan *soft power* suatu negara.

Diplomasi publik dilakukan untuk menarik perhatian publik asing melalui penyiaran, subsidi ekspor budaya, pengaturan pertukaran, dan lain sebagainya. *Soft power* negara menjadi sumber daya potensial yang mampu digunakan negara dalam mempersuasi atau memaksa negara lain tanpa mengerahkan kekuatan militer dan bentuk-bentuk *hard power* lainnya. Namun, isi budaya, nilai, dan kebijakan suatu negara tidak menarik, diplomasi publik yang dilakukan tidak dapat berpengaruh terhadap relasi negara-negara terlibat. Signifikansi penggunaan diplomasi publik dalam praktik hubungan internasional terlihat jelas pada era Perang Dingin dan masih digunakan oleh banyak negara hingga saat ini dalam menjalin relasi dengan negara lain. Melissen (2005) menyebutkan bahwa diplomasi publik mencakup upaya-upaya penanaman citra dan melakukan propaganda yang telah hadir sejak diplomasi hadir. Namun, lebih dari itu, diplomasi publik menargetkan publik secara umum dalam masyarakat asing dan kelompok, organisasi, dan individu non-resmi yang lebih spesifik.

Diplomasi publik berperan dalam membentuk opini publik masyarakat asing. Temuan Goldsmith, Horiuchi dan Matush (2021) menyatakan bahwa diplomasi publik – dalam hal ini kunjungan seorang pemimpin negara asing – dapat membentuk opini publik berupa dukungan publik. Kunjungan seorang pemimpin negara ke negara lain sering kali menjadi kesempatan untuk membangun citra negaranya karena negara yang berkunjung berusaha untuk meningkatkan citranya di seluruh dunia. Goldsmith, Horiuchi dan Matush (2021) menganalisis data kunjungan tingkat tinggi yang dilakukan oleh 15 pemimpin dari sembilan negara selama 11 tahun – dari 2008 hingga 2018 – dengan temuan terdapat delapan puluh enam kunjungan para pemimpin dari sembilan negara besar – Brasil, Kanada, Tiongkok, Jerman, India, Jepang, Rusia, Inggris dan AS. Hasil menunjukkan bahwa persetujuan publik terhadap kinerja pekerjaan pemimpin yang berkunjung meningkat rata-rata sebesar

2,3% ketika pemimpin tersebut mengunjungi daerah asing. Pengaruh dari kehadiran pemimpin negara asing terhadap opini publik tidak langsung memudar, terutama ketika acara-acara diplomasi publik diliput oleh media berita. Efek ini juga sangat besar ketika seorang pemimpin baru mengunjungi negara lain dalam tahun pertama mereka menjabat, sebuah fenomena yang disebut efek '*soft-power honeymoon effect*' oleh para peneliti, dimana ketika seorang pemimpin baru mengunjungi negara lain, pengaruhnya terhadap peringkat persetujuan publik terhadap pemimpin tersebut bisa dua kali lipat dari seorang pemimpin yang telah menjabat selama lima tahun atau lebih. Selain itu, Goldsmith, Horiuchi dan Matush (2021) juga memeriksa rasio kekuatan antara negara tamu dan negara tuan rumah berdasarkan data dari Correlates of War Project dengan hasil yang menunjukkan bahwa pengaruh diplomasi publik tidak bergantung pada keseimbangan *hard power* kedua negara. Ini menjadi bukti bahwa *soft power* tidak tergantung pada *hard power* dan diplomasi publik tidak boleh diabaikan hanya sebagai kinerja.

Opini publik menjadi salah satu instrumen penting dalam dinamika perpolitikan domestik dan global karena mampu memengaruhi hubungan yang terjalin antar negara. Osée, Bijoux, Didier dan François (2019) menyebutkan bahwa dewasa ini opini publik menjadi perhatian utama di negara-negara demokrasi dan media. Sejak tahun 1950an, opini publik secara bertahap diidentifikasi dan terkadang dilegitimasi sebagai faktor yang diperlukan dalam proses pengambilan keputusan politik. Opini publik disebut penilaian warga negara pada isu topikal (politik, ekonomi, sosial, dll). Selain itu, opini publik juga didefinisikan sebagai seperangkat keyakinan dan nilai yang kurang lebih dimiliki oleh populasi masyarakat tertentu pada waktu tertentu dan merupakan hasil dari aktivitas pemikiran individu yang terlibat secara politik. Adapun fungsi utama dari opini publik adalah peningkatan kesadaran, menginformasikan, protes dan demonstrasi serta publisitas. Dengan demikian, opini publik Indonesia

sejatinya memiliki peranan yang tidak dapat disepelekan dalam fenomena atau peristiwa kontestasi AS dan Tiongkok di Indonesia.

1.4.2. Model Tesis Homofili dan Analisis Various Dimension of Values

Berangkat dari tesis Homofili yang menyatakan bahwa kesamaan atau *similarity* membentuk rasa ketertarikan antar aktor, penulis kemudian berupaya melihat bagaimana efek Homofili dalam masyarakat Indonesia dengan fokus pada kedekatan nilai politik atau *political value proximity* dan kedekatan politik atau *political proximity*. Model tesis Homofili tidak hanya melihat bagaimana kedekatan dan strategi negara A yang dilakukan kepada negara B, melainkan juga melihat bagaimana kedekatan dan strategi yang diterapkan oleh negara C kepada negara B. Penulis mengacu pada tulisan Sheaffer, Shenhav, Takens dan Atteveldt (2014). Disebutkan bahwa nilai menjadi suatu hal esensi di tengah masyarakat bernegara. Nilai hadir dalam berbagai lapisan, yaitu baik pada tingkat individu dan kolektif. Dalam teori ini, Sheaffer et al. (2014) berbicara mengenai nilai di tingkat individu pada nilai-nilai demokrasi yang dipegang oleh individu. Berdasarkan survei yang dilakukan Inglehart dan Welzel (2005, dalam Sheaffer et al., (2014) menyimpulkan suatu faktor dari nilai-nilai yang dipegang individu, yang terbentuk dari nilai-nilai kelangsungan hidup dan ekspresi diri. Dari kesimpulan tersebut kemudian Sheaffer et al., (2014) menemukan bahwa terdapat polarisasi antara penekanan pada ketertiban, keamanan ekonomi, kesesuaian dan penekanan pada ekspresi diri, partisipasi dan kepercayaan. Sementara di tingkat yang lebih tinggi, terdapat konsepsi budaya politik yang didefinisikan sebagai seperangkat nilai yang menjiwai lembaga-lembaga politik utama suatu masyarakat (Feldman & Zaller, 1992, dalam Sheaffer et al., 2014). Budaya politik terkait dengan institusi politik yang ada, sehingga diperlukan indikator untuk mempertimbangkan nilai utama yang dianut oleh masyarakat. Secara singkat teori ini melihat nilai terpenting yang dianut oleh masyarakat, sehingga upaya diplomasi

publik, dalam konteks ini antara AS dan Tiongkok di Indonesia untuk membentuk opini publik masyarakat, juga turut terpengaruh. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa keputusan aktor, dalam hal ini masyarakat Indonesia, berasal dari nilai-nilai yang dianut oleh aktor tersebut. Oleh karena itu, pengetahuan akan hubungan bilateral antara Indonesia dengan AS dan Tiongkok dalam kurun waktu yang telah ditetapkan serta respons masyarakat untuk memahami nilai-nilai yang lebih dominan dalam masyarakat Indonesia.

1.5. Hipotesis

Berangkat dari kerangka berpikir di atas, penulis memiliki hipotesis bahwa kegagalan *cultural proximity* dalam menjelaskan opini publik masyarakat Indonesia yang lebih negatif terhadap Tiongkok daripada AS dilatarbelakangi oleh hadirnya *relative proximity* antara Indonesia dan AS, yang didasarkan dari perbandingan *political proximity* dan *value proximity* antara Indonesia, Tiongkok dan AS. Selain itu, terdapat kegagalan pemerintah Tiongkok dalam ‘memenangkan hati dan pikiran’ masyarakat Indonesia melalui diplomasi publik yang dilakukannya karena peristiwa-peristiwa dalam kurun waktu 2011-2021.

1.6. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode komparatif untuk menganalisis fenomena dan menemukan poin-poin persamaan dan perbedaan (MokhtarianPour, 2016). Fokus dari metode komparatif adalah persamaan dan perbedaan di antara unit-unit penelitian (Holt & Turner, 1970). Metode penelitian komparatif juga dapat didefinisikan sebagai metodologi penelitian di mana aspek-aspek ilmu sosial atau kehidupan diperiksa di berbagai budaya atau negara (Shahrokh & Miri, 2019). Hasil dari komparasi ini akan digunakan oleh penulis untuk menunjukkan derajat similaritas antar aktor-aktor terlibat.

1.6.1. Operasionalisasi Konsep

1.6.1.1. Political Value Proximity

Pada indikator ini, penulis melihat aspek kedekatan nilai politik dalam dua unit analisis, yaitu AS dan Tiongkok, serupa dengan nilai politik yang dianut oleh Indonesia. Dengan demikian, indikator ini dapat dioperasionalkan sebagai akumulasi persamaan atau perbedaan antara dua negara.

1.6.1.2. Political Proximity

Nilai kedekatan politik mewakili kepentingan politik dan kebijakan bersama yang dianut oleh AS, Tiongkok dan Indonesia. Sheaffer et al., (2014) merujuk pada tulisan Maoz et al., (2006) yang menyebutkan bahwa negara membentuk aliansi atas dasar keselarasan kepentingan strategis, dan ini merupakan aliran realis. Berangkat dari argumen tersebut, semakin besar kepentingan bersama antar negara, maka semakin besar pula kedekatan politik di antara kedua negara tersebut sehingga semakin sukses pula pelaksanaan diplomasi publik suatu negara terhadap negara tuan rumah, yaitu Indonesia.

1.6.1.3. Relative Proximity

Dalam model tesis Homofili yang nantinya akan membandingkan kedekatan nilai-nilai yang menjadi indikator dalam pembahasan ini, yaitu *political* dan *political values proximity*. Kedekatan relatif atau *relative proximity* melihat pada ‘negara mana yang memiliki kedekatan lebih’ dengan Indonesia, sehingga kemudian *cultural proximity* gagal dalam membentuk opini publik masyarakat Indonesia yang lebih positif terhadap Tiongkok dibandingkan dengan AS. Argumen Sheaffer et al., (2014) adalah negara mana yang memiliki kedekatan yang lebih dengan negara target akan

menjadi pemenang dalam persaingan yang sedang berlangsung. Model tesis homofili dengan *relative proximity* sebagai salah satu indikator kedekatan nilai yang dianut oleh masyarakat sebagai dasar dari pengambilan keputusan tidak hanya berfokus pada Indonesia dengan Tiongkok – yang kemudian disebut dengan kedekatan diadik – melainkan juga melihat kedekatan antara Indonesia dengan AS.

1.6.2. Tipe Penelitian

Berangkat dari pertanyaan penelitian dengan kata tanya ‘mengapa’ penulis menggunakan tipe penelitian eksplanatif. Tipe penelitian ini merupakan jenis penelitian yang menjelaskan hubungan sebab-akibat antara variabel-variabel independen dan dependen dalam sebuah fenomena dengan memberi jawaban berupa penjelasan atas penyebab dari terjadinya suatu fenomena yang dipersoalkan dalam rumusan masalah (Levi, 2002). Penelitian ini tidak akan menciptakan teori baru atau berfokus dalam memperdebatkan dan membandingkan teori, melainkan untuk menjawab rumusan masalah dan membuktikan hipotesis dengan data-data yang didapat. Tulisan ini akan membahas terkait kegagalan *cultural proximity* dalam menjelaskan preferensi masyarakat Indonesia terhadap Tiongkok di tengah kontestasi dua kekuatan *superpower*, yaitu AS dan Tiongkok, di Indonesia dengan melihat kedekatan-kedekatan lain dan strategi Tiongkok dan AS di Indonesia yang mampu menjelaskan penyebab kegagalan *cultural proximity*.

1.6.3. Ruang Lingkup dan Jangkauan Penelitian

Ruang lingkup dari penelitian ini adalah kontestasi diplomasi publik AS dan Tiongkok dalam membangun opini publik masyarakat Indonesia dengan menggunakan beberapa kedekatan nilai-nilai di luar kebudayaan, yaitu *political value proximity* dan *political proximity*, yang kemudian

mampu digunakan untuk menemukan *relative proximity* dari ketiga negara untuk menjawab rumusan masalah. Adapun fokus dari jangkauan penelitian berada di rentang tahun 2011 – 2021 yang didasarkan pada hasil dari survei Lowy Institute Indonesia Poll 2021.

1.6.4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan data dari sumber sekunder yang berasal dari buku, jurnal ilmiah, laporan, artikel-artikel kredibel terkait, dokumen resmi pemerintah dan sejumlah sumber terkait lainnya dari internet seperti berita internasional. Dengan demikian, penulis menggunakan teknik tinjauan pustaka atau *literature review* yang menurut Leedy (1989) tidak hanya untuk mengidentifikasi dan menganalisis semua informasi yang ditulis tentang suatu topik, tetapi juga untuk mendapatkan wawasan dan pemahaman tentang masalah yang dihadapi.

1.6.5. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data, penulis menggunakan teknik analisis kualitatif atau *qualitative content analysis*, yang menghasilkan interpretasi dan menemukan makna atas data yang didapat berdasar dari perspektif teori yang dipilih. Dalam penggunaan metode ini, penulis mereduksi data yang didapat hanya berfokus pada data-data yang relevan dan kredibel untuk kemudian dianalisis menggunakan teori yang dipilih untuk mencapai kesimpulan. Penulis melakukan perbandingan antara variabel dengan menggunakan indikator-indikator yang sudah ditentukan untuk menguji hipotesis yang sudah dibentuk. Kesimpulan merupakan hasil dari penerapan teori atas data fenomena yang kemudian dapat digunakan untuk membuktikan hipotesis penelitian (Hsieh & Shannon, 2005).

1.6.6. Sistematika Penulisan

Penelitian ini terbagi dalam lima bab, di antara lain: bab pertama (**BAB I**) berisikan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang permasalahan

yang diangkat, rumusan masalah, tinjauan Pustaka, kerangka pemikiran, hipotesis, dan metodologi penelitian, bab kedua **(BAB II)** membahas terkait hubungan Indonesia dengan Tiongkok baik secara umum dan lebih spesifik di masa pemerintahan Presiden Indonesia Widodo, strategi diplomasi publik Tiongkok di Indonesia, melihat kesamaan budaya Indonesia dan Tiongkok serta melihat respons masyarakat Indonesia terhadap Tiongkok, bab ketiga **(BAB III)** menjabarkan poin-poin pembahasan yang sama dengan bab sebelumnya, namun menggunakan AS sebagai fokus, bab keempat **(BAB IV)** membahas dan menganalisis terkait kedekatan-kedekatan yang ada di antara ketiga negara tersebut menggunakan indikator-indikator yang sudah ditentukan untuk memperoleh hasil penelitian, dan bab kelima **(BAB V)** berisikan kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah dilakukan.